

TAJUK RENCANA

Nataru, Tetap Waspada Covid-19

SEKITAR 4,45 juta wisatawan bakal membanjiri DIY saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Mereka akan menyerbu 23 destinasi wisata yang tersebar di lima kabupaten/kota di DIY. Berdasar data yang ada, DIY menjadi tujuan pertama wisatawan di Indonesia pada libur Nataru. Sebagai tuan rumah yang baik, DIY harus siap menyambut kedatangan mereka. Hari-hari ke depan hampir dipastikan ruas-ruas jalan di DIY bakal macet dipenuhi kendaraan roda dua maupun roda empat.

Ditlantas Polda DIY bersama instansi terkait sudah mengantisipasi kondisi tersebut, antara lain dengan melakukan rekayasa lalu lintas serta memanfaatkan smart city untuk memantau kendaraan yang keluar masuk DIY. Tentu masih banyak aspek yang harus diantisipasi agar wisatawan yang datang ke DIY merasa aman dan nyaman.

Libur Nataru kali ini masih diselimiti bayang-bayang acaman penyebaran Covid-19 varian baru. Pemda DIY pun melakukan sejumlah langkah antisipasi, antara lain menyiapkan 2.500 dosis vaksin Covid-19 untuk didistribusikan ke kabupaten/kota. Hal ini perlu dilakukan mengingat ada kenaikan kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia.

Meski belum ada kebijakan yang mengharuskan pemakaian masker, namun langkah baiknya, demi keselamatan bersama, masyarakat tetap mengenakan masker bila berkunjung ke tempat-tempat umum, baik pusat-pusat perbelanjaan, supermarket maupun tempat wisata. Apalagi, mereka yang sakit flu dan semacamnya hendaknya tetap mengenakan masker agar tidak menulari orang lain.

Pemerintah sejauh ini baru mengeluarkan imbauan yang sifatnya tidak memaksa. Tentu kita harus belajar dari pengalaman masa lalu, ketika Covid-19 menyebar ke mana-mana dan kita terdapat harus mengatasinya. Ribuan korban jiwa jatuh akibat pandemi Covid-19, rumah sakit-rumah sakit penuh sesak pasien Covid-19, bahkan sebagian besar tak tertampung dan hanya ditempatkan di selasar rumah sakit maupun tenda-tenda darurat.

Pengalaman tersebut sangatlah berharga dan tak boleh terulang. Prinsipnya, jangan abaikan Covid-19 meski saat ini kenaikan kasusnya belum signifikan. Kita memprediksi, dengan membanjirnya jumlah wisatawan ke DIY, bakal menaikkan jumlah kasus Covid-19. Mumpung hal itu belum terjadi, alangkah baiknya kita bersiap mengantisipasinya, antara lain dengan menerapkan protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Dicabutnya status pandemi Covid-19 di Indonesia bukan diartikan bahwa kita telah terbebas dari ancaman Covid-19. Melainkan justru harus meningkatkan kesadaran kita untuk taat prokes dan membiasakan PHBS dalam kehidupan keseharian kita. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa seluruh objek wisata di DIY telah menerapkan CHSE sesuai standar.

DIY harus memelopori wisata yang aman dan sehat agar bisa menjadi percontohan bagi daerah lain. Dengan cara itu, kita yakin wisatawan akan lebih betah tinggal di DIY dan membelanjakan uangnya. Ekonomi rakyat pun akan bergerak mengikuti irama wisatawan. □-d

Kita Perempuan, Punya Hak Suara

BEBERAPA hari lalu, penulis mengikuti pertemuan 'Perempuan Istimewa' di Kampus UIN Sunan Kalijaga. Pertemuan dimaksudkan untuk mengembangkan marwah Kongres Perempuan Indonesia. Sehingga, para perempuan ketika memeringati Hari Ibu, Hari Kartini tidak sekadar seremonial. Sangat diharapkan, peringatan tersebut sebagaimana dikemukakan GKR Hemas, mampu memberi makna bagi perempuan untuk lebih berdaya dan berjaya.

Jika menilik peristiwa 95 tahun silam, tujuan Kongres Perempuan I dilaksanakan adalah untuk mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan perempuan Indonesia. Karena di masa itu, perempuan masih sangat terbelenggu dengan budaya yang menempatkan posisi perempuan sekadar sebagai *kanca wingking*, kelas paling terakhir. Mengingat masa kolonial kelas pertama *Europeanen*, kelas kedua *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing) yang meliputi orang Tionghoa, Arab, India maupun non-Eropa lain dan baru ketiga adalah *Inlander* atau pribumi. Sebagai pribumi dan *kanca wingking*, pendidikan untuk perempuan jauh tertinggal. Hanya sedikit sekali, perempuan mengenyam pendidikan sekolah.

Namun Kongres Perempuan I mampu mendobrak zamannya. Suara pun dilantangkan agar perempuan setara laki-laki. Kongres merekomendasikan mendirikan federasi perempuan, membuat surat kabar dan studifonds untuk membantu perempuan remaja yang tidak mampu. Kemudian memperkuat kependudukan putri dan mencegah perkawinan anak. Mengirimkan mosi agar pemerintah (1) secepatnya diadakan fond bagi janda dan anak (2) tunjangan bersifat pensiun janda dan tunjangan (3) sekolah untuk anak perempuan diperbanyak. Juga mengirimkan mosi untuk Raad Agama agar tiap talak diikutkan secara tertulis sesuai peraturan agama.

SEBUAH 'pernyataan bernada sinis'

Fadmi Sustiwi

pernah dilontarkan seorang lelaki terkait pernikahan anak. Menurutnya, perjuangan perempuan itu *zonk*, tanpa hasil. "Buktinya, sudah dibicarakan bahkan direkomendasikan dalam Kongres Perempuan I, problema pernikahan anak hingga kini masih menjadi masalah".



KR-JOKO SANTOSO

Kongres Perempuan adalah pembuka jalan untuk menegaskan, di negeri ini ada sosok perempuan yang bisa bergerak dan menggerakkan perjuangan. Maka, perempuan terus beragama, karena dinamika kehidupan dan perkembangan sosial masyarakat membuat persoalan yang dihadapi perempuan dan anak, hingga kini kian beragam. Ada angka kematian ibu (AKI) melahirkan, angka kematian bayi (AKB), stunting, *bullying*, KDRT, pernikahan anak, kehamilan tidak dikehendaki, perdagangan perempuan dan anak. Juga ada diskriminasi upah, kemiskinan perempuan dan lainnya. Tetapi apakah ini hanya menjadi persoalan perempuan?

Yang mengalami dan menjadi korban, mungkin perempuan. Hanya kita perlu

lebih jeli melihat. Mengingat dampak dari problema yang dihadapi perempuan dan anak tersebut, akan sangat memengaruhi masa depan bangsa. Bangsa Indonesia tidak bisa disebut bahagia jika apalagi sejahtera jika ketika memasuki Indonesia Emas dengan angka stunting yang tinggi, AKI menurut data BPS masih di posisi ke-3 di ASEAN (good-stats.id, 13/10). Sementara angka pernikahan anak menurut UNICEF menempati peringkat 4 dalam perkawinan anak global. Atau dalam bahasa BKKBN terjadi 26 per 1.000.

Artinya, ini bukan persoalan perempuan semata. Ini adalah persoalan bangsa yang harus dipikirkan bersama.

TAGLINE 'Aku, Kamu, Kita Punya Hak Suara' yang digaungkan dalam pertemuan Perempuan Istimewa, itu penuh makna. Perempuan memiliki hak suara dan harus bersuara. Perlu terus melantangkan sekaligus menyadarkan bangsa akan adanya problem yang dihadapi. Tentu untuk bersama anak bangsa lain (laki-laki), mencari solusi.

Ajakan bersuara ini menemukan momentumnya, di tahun politik. Karena ini bukan sekadar kata manis dalam pertemuan Perempuan Istimewa. Hak bersuara harus digunakan untuk menguatkan barisan perempuan memahami persoalan yang seakan dihadapi perempuan, yang ada pada pengambilan keputusan. □-d

*) **Fadmi Sustiwi** jurnalis, peduli kesehatan dan keadilan sosial

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Informasi Publik dalam Pemilu

Wawan Budiyanto

pemilu dan pilkada adalah *hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau pengawasan pemilu dan pilkada*. Yang dimaksud sanksi adalah sanksi yang diberikan kepada penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun siapa saja karena telah melakukan pelanggaran etika, pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu dan pilkada.

Sebagai contoh misalnya dalam tahapan kampanye, informasi tentang sanksi kepada peserta pemilu yang melanggar aturan pemasangan alat peraga kampanye, atau sanksi terkait pelanggaran aturan pelaporan dana kampanye. Informasi tentang sanksi seharusnya menjadi bagian dari informasi yang disediakan oleh penyelenggara pemilu secara berkala, tanpa harus diminta oleh pencari informasi. Dan dalam rangka diseminasi, pengumuman informasi tersebut harus disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada tentunya tak terlepas dari dinamika, dan tak terduga dinamika yang terjadi membutuhkan respon yang cepat dan tepat karena menyangkut implementasi azas maupun prinsip pemilu, respons penyelenggara pemilu harus mampu memberikan kepastian hukum yang dapat dipedomani oleh penyelenggara, peserta, serta pemilih. Perubahan regulasi merupakan bagian Informasi Serta Merta yang harus diumumkan secara cepat mudah dijangkau masyarakat

dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Misal terjadi perubahan ketentuan atau SOP tentang mekanisme dan format debat kampanye.

Pemilu Susulan

Faktor-faktor yang menyebabkan Pemilu Lanjutan maupun Susulan adalah terjadinya keadaan disebabkan hal-hal di luar kekuasaan dan keadaan memaksa. Bisa berupa kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang membuat pemilu tidak bisa dilaksanakan sebagian atau seluruh tahapan Pemilu sebagaimana termuat dalam Pasal 431 sampai dengan Pasal 433 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini juga merupakan Informasi Serta Merta yang harus disediakan dan diumumkan oleh Penyelenggara Pemilu.

Penyediaan informasi publik di pemilu dan pilkada penting. Sebagai upaya mewujudkan pemilu dan pilkada yang lebih partisipatif, akuntabel dan berintegritas. □-d

*) **Wawan Budiyanto**, Anggota Komisi Informasi Daerah DIY 2023-2027.

Pojok KR

Netralitas ASN, 59 Pj kepala daerah dapat rapor merah.

-- Kalau tak bisa diperbaiki, perlu disanksi.

Libur Nataru, 4,45 juta wisatawan banjir DIY.

-- DIY harus jadi tuan rumah yang baik.

Pemda DIY siapkan 2.500 dosis vaksin Covid-19.

-- Tetap waspada, ancaman belum sirna.

Berabe

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

Naskah dikirim Email atau WA

📧 pikiranpembaca@gmail.com

☎ 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55232. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Merencanakan Liburan yang Menyenangkan

SEBENTAR lagi libur sekolah. Artinya bagi anak-anak acaa ada hari-hari yang bebas dari pelajaran bahkan mungkin pekerjaan rumah, 'PR'. Ini tentu amat sangat menyenangkan. Karena itu, sejatinya bagi keluarga yang memiliki anak-anak, perlu merencanakan liburan dengan cerdas.

Merencanakan liburan tidak harus berlibur dalam arti ke luar kota dan menggunakan banyak uang. Bagi anak-anak yang dikota, bisa meren-

canakan liburan ke rumah keluarga : entah kakek-nenek, paman-bibi atau yang lain. Kalau keluarga itu menetap di pedesaan, mungkin akan lebih menyenangkan. Mungkin di sana bisa belajar budaya, kebiasaan warga setempat, permainan di situ atau yang lain, yang melibatkan warga sekitar keluarga. Berkebun, ke sawah bahkan ke hutan, ke sungai dan lainnya, tentu akan menyenangkan. □-d

*) **Asri NH SPd, Jl Moh Hatta Magelang**

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriga Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSoS, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrky23@yahoo.com, iklankrky13@gmail.com. **Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'...** Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)